

# Dari Perencanaan ke Realisasi: Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Efektivitas Program di Kabupaten Bangkalan

Rimanah<sup>1</sup>, Nur Amisya Mayunie Ismail<sup>2</sup>, Akmal Farhan Tito Rohmatulloh<sup>3</sup>, Rohmatul Ummah<sup>4</sup>, Mohamad Djasuli<sup>5</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Trunodjoyo Madura

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

### Keywords:

Kinerja Anggaran, Efektivitas Program, Rasio Efektivitas, APBD, Pemerintah Daerah, Evaluasi Anggaran.

## ABSTRACT

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan tingkat efektivitas program ditinjau dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan efektivitas menggunakan data sekunder APBD dan LRA Kabupaten Bangkalan periode 2023–2025. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas untuk mengukur kesesuaian antara target dan realisasi anggaran.

**Originalitas/Novelty:** Menggabungkan tiga aspek yang biasanya dipisah, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan efektivitas program pembangunan daerah dalam satu kerangka analisis yang utuh dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan faktor eksternal yaitu dinamika kebijakan nasional, sebagai penentu penting kinerja anggaran daerah.

**Hasil Penelitian:** Kinerja anggaran berfluktuasi selama 2023–2025. Pada tahun 2023 berkategori cukup efektif (87,75%), meningkat menjadi efektif pada tahun 2024 (98,29%), lalu menurun drastis menjadi kurang efektif pada tahun 2025 (58,59%). Fluktuasi ini dipengaruhi oleh faktor internal (kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran) serta faktor eksternal (dinamika kebijakan fiskal).

**Implikasi:** Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi agar kinerja anggaran menjadi lebih optimal dan akuntabel.

**Research Objectives:** To analyze the budget performance of the Bangkalan Regency Local Government based on the level of program effectiveness, in term of the conformity between budget planning and realization.

**Research Method:** This study uses a quantitative descriptive method with an effectiveness approach using secondary data from the Bangkalan Regency Regional Budget (APBD) and Budget Realization (LRA) for the 2023–2025 period. The analysis was conducted by calculating the effectiveness ratio to measure the conformity between budget targets and realization.

**Originality/Novelty:** This study integrates three aspects that are typically examined separately – budget planning, budget implementation, and the effectiveness of regional development programs – into a single, comprehensive analytical framework. In addition, this study explicitly incorporates an external factor, namely the dynamics of national fiscal policy, as an important determinant of regional budget performance.

**Research Results:** Budget performance fluctuated during 2023–2025. In 2023, it fell into the fairly effective category (87.75%), increased to effective in 2024 (98.29%), then declined sharply to less effective in 2025 (58.59%). This fluctuation was influenced by internal factors (the quality of budget planning and implementation) as well as external factors (the dynamics of fiscal policy).

**Implications:** This study emphasizes the importance of improving the quality of planning and evaluation so that budget performance becomes more optimal and accountable.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## Corresponding Author:

Mohamad Djasuli

Akuntansi S1, Universitas Trunodjoyo Madura

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

[djasuli@trunodjoyo.ac.id](mailto:djasuli@trunodjoyo.ac.id)

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah merencanakan, melaksanakan, dan menilai berbagai program yang

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, kinerja anggaran tidak hanya ditentukan oleh rasio penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi juga oleh kemampuannya untuk memenuhi rencana pembangunan. Dalam hal ini, efektivitas anggaran menjadi salah satu kriteria penting untuk menilai seberapa baik pengelolaan keuangan daerah berfungsi. Banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bangkalan, masih menghadapi masalah efektivitas anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas yang dilakukan dengan data APBD dan LRA Kabupaten Bangkalan dari tahun 2023–2025, ada perbedaan yang cukup signifikan. Ditemukan bahwa rasio efektivitas pada tahun 2023 adalah 87,75%, dan meningkat menjadi 98,29% pada tahun 2024 dan menurun secara drastis menjadi 58,59% pada tahun 2025. Pada tahun yang sama, realisasi belanja modal hanya 31,98%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Akibatnya, program pembangunan mungkin tidak mencapai hasil yang optimal. Temuan menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi yang lebih akurat terhadap kinerja anggaran. Hal ini sangat penting terutama dalam hal perencanaan anggaran dan realisasi anggaran untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penelitian ini semakin penting karena pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk menerapkan program prioritas daerah.

Beberapa program prioritas daerah yang telah dialokasikan dananya oleh pemerintah daerah untuk tahun 2025 antara lain pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan dengan total biaya sekitar Rp 135 miliar (Den & Red, 2025; Rusdi, 2025). Selain itu, pemerintah berharap program-program tersebut berhasil melalui APBD 2025, yang akan membantu mempercepat pembangunan daerah (Yonavillbia, 2025). Namun, selama tahun 2025–2029, Kabupaten Bangkalan masih menghadapi banyak tantangan dalam proses pembangunan, seperti tata kelola pemerintahan, kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pembangunan ekonomi daerah (Rajib & Supriyadi, 2025). Agar pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, alokasi anggaran untuk semua kebutuhan tersebut harus dikelola dengan tepat.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), efektivitas dapat dianggap sebagai salah satu kriteria utama dalam menilai keberhasilan penggunaan anggaran publik. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu program atau kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tingkat efektivitas anggaran dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program pembangunan dan kualitas tata kelola keuangan daerah. Efektivitas anggaran menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara transparan dan berfokus pada hasil (Melkers & Willoughby, 2005). Ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran daerah tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat serapan anggaran, dan penundaan pencapaian output dan hasil program pembangunan.

Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan layanan publik, menurunnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur, dan ketidakmampuan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, rendahnya efektivitas anggaran dapat mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat setempat karena tujuan pembangunan tidak tercapai secara efektif. Secara keseluruhan, hal ini dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan di daerah (Abbasov, 2025). Menurut penelitian sebelumnya, penganggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kinerja anggaran daerah (Anggraeni & Saleh, 2020; Sofiani & Retnani, 2019). Penelitian Yunas, Ramadhan, Damayanti, & Wahyudi, (2024) menemukan bahwa sektor kesehatan sangat efektif dalam penerimaan anggaran di Kabupaten Bangkalan.

Sementara itu, studi Handayani & Zulfatillah, (2025) menunjukkan bahwa Pembangunan daerah bergantung pada konsistensi antara perencanaan, indikator kinerja, dan penganggaran. Namun, penelitian belum memberikan pemahaman yang memadai tentang bagaimana perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian program pembangunan saling berinteraksi. Khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan, tidak banyak penelitian yang mempelajari hubungan antara perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan efektivitas program pembangunan secara bersamaan. Efektivitas anggaran, efisiensi belanja, atau kualitas dokumen perencanaan adalah topik utama studi sebelumnya. Akibatnya, banyak yang tidak memiliki gambaran menyeluruh mengenai kinerja anggaran pemerintah daerah. Padahal, ketiga komponen tersebut saling terkait dan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap penelitian terkait hubungan antara perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan efektivitas program pembangunan pada tingkat pemerintah daerah. Dengan mempertimbangkan semua kondisi tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja anggaran di Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan menilai efektivitas anggaran dan kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2023-2025. Kebaruan penelitian ini adalah penggunaan kerangka analisis yang menggabungkan elemen perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan keberhasilan program pembangunan ke dalam satu penelitian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang biasanya menilai efisiensi anggaran atau efektivitas anggaran secara terpisah, penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan tiga elemen tersebut secara bersamaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana anggaran pemerintah Kabupaten Bangkalan berjalan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bahwa akan memperkaya literatur tentang kinerja anggaran sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah (APBD) untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara efektif.

## Kerangka Teori dan Hipotesis

### Teori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Konsep yang mendasari penelitian ini adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia (2014), Kinerja didefinisikan sebagai hasil atau produk yang dihasilkan dari kegiatan atau program yang dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran.

Peraturan yang sama juga menegaskan bahwa program mencakup penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, yang meliputi kegiatan, keluaran (output), hasil (outcome), indikator kinerja, serta laporan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintahan tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga mencakup keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaksanaan, dan evaluasi hasil program (Panggalih & Bastian, 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, evaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah harus meliputi tingkat pelaksanaan anggaran serta tingkat kontribusi pelaksanaan anggaran terhadap pencapaian tujuan program. Maka dari itu, variabel yang sangat penting untuk menentukan apakah APBD telah digunakan dengan benar untuk mencapai tujuan pembangunan daerah adalah efektivitas program.

SAKIP menegaskan bahwa kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari ketercapaian tujuan program secara terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan. Hal ini memperkuat bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah mencerminkan hubungan yang erat antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil (Panggalih & Bastian, 2024).

Dengan demikian, evaluasi kinerja anggaran tidak cukup hanya melihat realisasi anggaran, tetapi juga perlu menilai efektivitas program dalam menghasilkan outcome yang diharapkan. Sejumlah penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran merupakan salah satu indikator utama rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

### Teori Value For Money

Penelitian ini juga menggunakan metode *value for money*, dengan tiga bagian utama yang dipertimbangkan seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam sektor publik, ekonomi menunjukkan seberapa efisien penggunaan sumber daya, efisiensi menunjukkan rasio antara input dan output, dan efektivitas menunjukkan seberapa sukses suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Polii et al. (2020) tiga bagian ini dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, Anggita Suridiyanti et al. (2024) menemukan bahwa rasio ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah menggunakan konsep *value for*

*money*. Jadi konsep ini dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan daerah, khususnya dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penelitian ini, aspek efektivitas ditempatkan sebagai fokus utama karena tujuan penelitian adalah menilai kesesuaian antara perencanaan program dan tingkat pencapaiannya.

Penekanan pada efektivitas didasarkan pada pertimbangan bahwa indikator ini lebih sensitif dalam menggambarkan keberhasilan implementasi anggaran publik dibandingkan dengan efisiensi maupun ekonomi, karena secara langsung mencerminkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **Teori Anggaran Berbasis Kinerja**

Penelitian ini juga menggunakan metode anggaran berbasis kinerja, yaitu meliputi pada sistem penganggaran yang menekankan hubungan antara pendanaan dan tujuan kinerja. Anggraeni & Saleh (2020) menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja adalah bagian penting dari proses pembuatan anggaran karena membantu mencapai tujuan yang jelas dan dapat diukur terkait kinerja dan akuntabilitas lembaga pemerintah.

Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Sofiani & Retnani (2019), setiap anggaran harus menghasilkan hasil yang dapat diukur. Maka dari itu, penganggaran berbasis kinerja tidak dapat dipisahkan dari fase perencanaan, implementasi, pelaporan, dan evaluasi. Oleh karena itu, hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran sangat penting dalam menentukan apakah anggaran telah digunakan secara tepat untuk memfasilitasi pelaksanaan program.

### **Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah**

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD untuk tata kelola dan pembangunan dikenal sebagai kinerja anggaran. Konsep ini tidak hanya meliputi kinerja keuangan, tetapi juga meliputi keberhasilan program yang didukung anggaran tersebut. Menurut Said, Rais, & Timur (2025), desentralisasi keuangan, efisiensi pengeluaran, varians pendapatan, efektivitas, dan varians pengeluaran adalah beberapa cara untuk mengukur kinerja anggaran. Dalam penelitian ini, fokus utama kinerja anggaran diarahkan pada efektivitas program sebagai representasi keberhasilan implementasi APBD.

### **Efektivitas Program**

Efektivitas program di artikan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan program dengan sukses sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kesesuaian antara target program dan hasil yang dicapai berkaitan positif dengan efektivitas program. Menurut penelitian Rahman & Saputra (2022) menekankan bahwa efektivitas dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur seberapa efektif dan tepat sasaran penggunaan dana publik. Efektivitas program tidak hanya bergantung pada sejauh mana kesesuaian antara target dan realisasi, tetapi administrasi pemerintahan daerah juga harus membantu proses perencanaan anggaran, implementasi, dan pelaporan (Luthfi Azhari, Tumija, & Restu Widyo Sasongko, 2025).

Penelitian Damayanti et al. (2024) menemukan bahwa dalam konteks saat ini di Kabupaten Bangkalan, analisis laporan pelaksanaan anggaran dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur efektivitas administrasi keuangan. Sementara itu, Handayani & Zulfatillah (2025) menemukan bahwa rencana yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Bangkalan mengandung indikator yang berkaitan dengan kinerja program, konsistensi, dan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi.

Efektivitas program diukur sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan selama proses pembuatan program, yang dimasukkan dalam anggaran tahunan kabupaten. Oleh karena itu, efektivitas program dianggap tidak hanya berarti penilaian efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas anggaran pemerintah daerah. Semakin sesuai tujuan yang direncanakan dengan pencapaiannya, semakin besar kemungkinan efektivitas operasional anggaran.

### **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka tepritik yang telah di jelaskan, kinerja anggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan program. Dalam

kontekks ini, efektifitas program menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan penggunaan anggaran daerah. Semakin tinggi tingkat kesesuai antara target yang di rencanakan dalam apbd dengan realisasi program, maka semakin tinggi tingkat efektifitas program yang di capai. Hal ini mencerminkan bahwa anggaran telah digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara target anggaran dan realisasi program merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kinerja anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, efektifitas program menjadi indikator yang paling relevan untuk menilai keberhasilan implementasi APBD.

Hipotesis penelitian ini meliputi:

H1: Ada kesesuaian antara perencanaan anggaran program dan pelaksanaannya, sehingga kinerja anggaran pemerintah Kabupaten Bangkalan dianggap efektif.

Hipotesis ini bersifat deskriptif-eksplanatif karena tidak hanya menggambarkan kondisi kinerja anggaran, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara variabel perencanaan dan efektivitas pencapaian kinerja anggaran.

### Kerangka Pemikiran

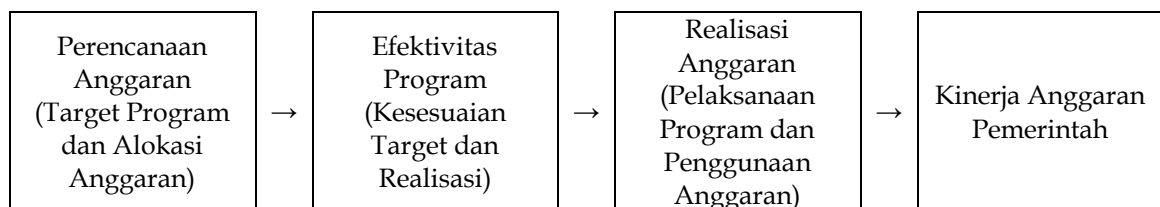
Pengelolaan anggaran di tingkat daerah biasanya dimulai dengan perencanaan, yang meliputi identifikasi program, tujuan, dan alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini membentuk dasar tindakan pemerintah daerah dalam mengembangkan program pembangunan dan layanan lainnya. Perencanaan, akan berhasil jika tujuan ditetapkan dengan benar dan anggaran digunakan dengan baik.

Langkah selanjutnya adalah realisasi anggaran, yang menunjukkan seberapa efektif program telah dilaksanakan. Realisasi anggaran menunjukkan apakah anggaran telah dialokasikan dengan benar untuk pelaksanaannya. Ini berarti bahwa aspek penting dalam hal menghubungkan perencanaan dengan realisasi adalah apakah anggaran telah dialokasikan dengan tepat untuk pelaksanaan program.

Selain itu, tingkat kesesuaian antara perencanaan anggaran dan pencapaian anggaran digunakan sebagai indikator efektivitas program. Efektivitas program mewakili tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang ditargetkan. Semakin besar tingkat kesesuaian antara tujuan program dan pencapaian anggaran, semakin baik program. Jika ada perbedaan yang penting antara tujuan program dan pencapaian anggaran, program tersebut dapat dianggap tidak efektif.

Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan didasarkan pada kinerja program. Artinya, kinerja anggaran menunjukkan seberapa baik penyerapan anggaran dan seberapa baik pemerintah daerah melaksanakan program sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, sebagai bagian penting dari menentukan seberapa efektif program, dan kemudian kinerja anggaran, penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis pencapaian anggaran dan perencanaan anggaran.

### Diagram Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka teori ini, tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran program berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan juga mungkin berada dalam kategori yang lebih baik.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis kinerja anggaran

pemerintah daerah berdasarkan tingkat efektivitas program selama 2023-2025. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan kondisi kinerja anggaran secara sistematis dan fluktuatif, sementara jenis data kuantitatif digunakan karena pengukuran efektifitas dilakukan melalui perhitungan rasio atas data APBD dan LRA yang bersifat terukur dan objektif (Sugiyono, 2016).

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan APBD kabupaten Bangkalan tahun 2023-2025, yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah. Periode 2023-2025 dipilih karena mencerminkan dinamika pengelolaan anggaran pasca pandemi hingga implementasi kebijakan fiskal terkini.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bangkalan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah daerah; (2) Data APBD dan LRA yang tersedia secara lengkap dan dapat diakses untuk periode tahun anggaran 2023 hingga 2025; dan (3) Data mencakup seluruh komponen belanja daerah yang relevan, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Lainnya. Alasan pemilihan periode 2023-2025 didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mencerminkan dinamika pengelolaan anggaran daerah dalam konteks pasca-pandemi hingga implementasi kebijakan fiskal terkini, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang relevan dan aktual mengenai kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dengan kriteria tersebut, sampel penelitian ini terdiri dari tiga tahun laporan keuangan (2023, 2024, dan 2025) yang mewakili seluruh komponen belanja dalam APBD Kabupaten Bangkalan.

### Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen atau laporan yang telah dipublikasikan (Sugiyono, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini mencakup tiga jenis dokumen resmi, yaitu Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bangkalan, serta dokumen resmi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Keseluruhan data tersebut diperoleh melalui akses terhadap publikasi resmi pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang mencakup periode tahun anggaran 2023-2025.

### Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen (X) merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah target anggaran (perencanaan) yang diperoleh dari dokumen APBD Kabupaten Bangkalan. Variabel ini mempresentasikan jumlah anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah yang membiayai seluruh program dan kegiatan dalam satu periode anggaran, sehingga menjadi tolok ukur awal dalam evaluasi kinerja anggaran.

Variabel Dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah realisasi anggaran yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Variabel ini mencerminkan jumlah anggaran yang benar-benar digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama periode anggaran berjalan, sekaligus menjadi dasar pengukuran Tingkat efektivitas pencapaian target yang telah ditetapkan.

### Pengukuran Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian antara realisasi dan target anggaran. Rumus efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas:

- 100% = Sangat efektif
- 90% – 100% = Efektif
- 80% – 89% = Cukup efektif

- 60%-79% = Kurang Efektif
- <60% = Tidak Efektif

Model Penelitian:

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model perbandingan antara target dan realisasi anggaran untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$Efektivitas = f(Target, Realisasi)$$

Model ini digunakan untuk melihat sejauh mana realisasi anggaran mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

### Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan model perbandingan deskriptif (descriptive comparative model) antara target dan realisasi anggaran. Model ini dipilih karena penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang bertujuan mengukur tingkat pencapaian, bukan menguji hubungan kausalitas antar variabel. Dengan demikian, penggunaan model regresi atau uji signifikansi statistik inferensial (seperti uji-t atau uji F) tidak relevan secara metodologis dalam konteks penelitian ini, mengingat data yang digunakan bersifat populasi (seluruh komponen belanja APBD) dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi berbasis sampel probabilistik. Kekuatan analisis penelitian ini terletak pada kedalaman interpretasi rasio efektivitas per komponen belanja dan per tahun anggaran, yang memungkinkan identifikasi pola dan tren kinerja anggaran secara sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yang saling berkesinambungan. Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data anggaran dan realisasi dalam bentuk table beserta persentase efektivitasnya. Kedua, perhitungan rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target anggaran untuk setiap tahun penelitian, sehingga diperoleh Gambaran Tingkat pencapaian yang terukur. Ketiga, analisis tren digunakan untuk melihat perkembangan Tingkat efektivitas anggaran dari tahun ke tahun selama periode 2023-2025, guna mengidentifikasi pola perubahan kinerja anggaran secara sistematis. Keempat, interpretasi hasil dilakukan dengan mengklasifikasikan hasil perhitungan efektivitas berdasarkan kriteria efektivitas yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja anggaran pemerintah daerah secara menyeluruh.

## Hasil dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif Kinerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2025

Analisis kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dilakukan berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2023 hingga 2025. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bangkalan yang mencakup lima komponen belanja, yaitu: Belanja Daerah (total), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, serta Belanja Lainnya. Perhitungan rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1 Rekapitulasi Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2025**

| Tahun | Jenis Belanja         | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    | Efektivitas (%)          |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 2023  | Belanja Daerah        | 2.327.640.000.000 | 2.042.550.000.000 | 87,75% (Cukup Efektif)   |
| 2023  | Belanja Pegawai       | 938.397.000.000   | 812.063.000.000   | 86,54% (Cukup Efektif)   |
| 2023  | Belanja Barang & Jasa | 538.079.000.000   | 516.832.000.000   | 96,05% (Efektif)         |
| 2023  | Belanja Modal         | 230.955.000.000   | 228.383.000.000   | 98,89% (Efektif)         |
| 2023  | Belanja Lainnya       | 620.205.000.000   | 485.276.000.000   | 78,24% (Kurang Efektif)  |
| 2024  | Belanja Daerah        | 2.502.060.000.000 | 2.459.310.000.000 | 98,29% (Efektif)         |
| 2024  | Belanja Pegawai       | 1.014.770.000.000 | 994.508.000.000   | 98,00% (Efektif)         |
| 2024  | Belanja Barang & Jasa | 596.943.000.000   | 602.815.000.000   | 100,98% (Sangat Efektif) |

|      |                       |                   |                   |                          |
|------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|      | Jasa                  |                   |                   |                          |
| 2024 | Belanja Modal         | 280.565.000.000   | 294.683.000.000   | 105,03% (Sangat Efektif) |
| 2024 | Belanja Lainnya       | 609.776.000.000   | 567.303.000.000   | 93,03% (Efektif)         |
| 2025 | Belanja Daerah        | 2.668.932.529.435 | 1.563.674.630.831 | 58,59% (Kurang Efektif)  |
| 2025 | Belanja Pegawai       | 1.050.741.827.449 | 748.941.285.680   | 71,28% (Kurang Efektif)  |
| 2025 | Belanja Barang & Jasa | 663.272.596.231   | 373.933.171.267   | 56,38% (Kurang Efektif)  |
| 2025 | Belanja Modal         | 436.317.525.370   | 139.551.967.266   | 31,98% (Kurang Efektif)  |
| 2025 | Belanja Lainnya       | 518.600.580.385   | 301.248.206.617   | 58,09% (Kurang Efektif)  |

*Sumber: APBD dan LRA Kabupaten Bangkalan (diolah), 2023-2025*

### Analisis Kinerja Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, total Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Mencapai Rp2.042.550.000.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.327.640.000.000, sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 87,75%. Angka ini menempatkan kinerja belanja daerah secara keseluruhan ke dalam kategori cukup efektif berdasarkan kriteria penilaian. Meskipun secara agregat berada pada kategori cukup efektif, terdapat disparitas yang cukup signifikan antar komponen belanja. Belanja Modal mencatat tingkat efektivitas tertinggi, yakni sebesar 98,89%, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan aset tetap pada tahun tersebut berjalan dengan baik. Hal ini menyatakan bahwa belanja modal yang tinggi tingkat penyerapannya merupakan indikator positif dari kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 juga mencatat kinerja yang memuaskan dengan rasio efektivitas sebesar 96,05%, masuk dalam kategori efektif. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program operasional pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sebaliknya, komponen Belanja Lainnya hanya mencapai efektivitas sebesar 78,24% dan masuk dalam kategori kurang efektif. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan alokasi anggaran pada kelompok belanja tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Fuat & Djasuli (2024) bahwa salah satu tantangan utama dalam reformasi anggaran daerah adalah lemahnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan implementasi belanja di lapangan. Belanja Pegawai mencatat tingkat efektivitas 86,54% (cukup efektif), yang mengindikasikan masih terdapat pos belanja kepegawaian yang tidak terserap optimal, kemungkinan disebabkan oleh kekosongan jabatan atau penundaan rekrutmen aparatur sipil daerah.

### Analisis Kinerja Anggaran Tahun 2024

Tahun anggaran 2024 menandai peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, Belanja Daerah mencapai rasio efektivitas sebesar 98,29%, yang termasuk dalam kategori efektif. Bahkan, dua komponen belanja mencatat kinerja melampaui target anggaran, yakni Belanja Barang dan Jasa dengan rasio 100,98% dan Belanja Modal dengan rasio 105,03%, keduanya masuk dalam kategori sangat efektif. Kondisi ini mencerminkan peningkatan kapasitas perencanaan dan eksekusi anggaran yang lebih baik dari tahun ke tahun. Sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten berkorelasi positif terhadap peningkatan efektivitas realisasi APBD.

Perlu dicatat bahwa realisasi yang melampaui anggaran pada Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa dapat pula mengindikasikan adanya penambahan anggaran melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) yang tidak terantisipasi sepenuhnya dalam perencanaan awal. Kondisi realisasi di atas 100% perlu di kribi secara mendalam karena tidak selalu merupakan indikator kinerja positif, fenomena ini justru mencerminkan kelemahan akurasi perencanaan, Dimana target awal di tetapkan terlalu rendah dari kebutuhan actual. Sebagai perbandingan. Said rais (2025) pada kabupaten Gowa menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas perencanaan yang lebih matang umumnya memiliki rasio efektifitas stabil di kisaran 90-98% tanoa lonjakan di atas 100% yang mengindikasikan keselarasan yang lebih antara dareha berhasil mengeksekusi program pembangunan secara menyeluruh. Namun demikian, secara substansial, capaian tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengeksekusi program pembangunan secara menyeluruh. Belanja Pegawai pada tahun 2024 mencapai 98,00% (efektif), sementara Belanja Lainnya mencapai 93,03% (efektif). Konsistensi peningkatan di seluruh komponen belanja menunjukkan perbaikan mutu perencanaan yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2014). Raniwihati & Djasuli (2024) juga menegaskan bahwa implementasi standar akuntansi yang tepat turut berkontribusi pada kualitas laporan keuangan sektor publik yang lebih akuntabel dan transparan.

### **Analisis Kinerja Anggaran Tahun 2025**

Berbeda dengan tren positif yang terjadi pada dua tahun sebelumnya, tahun anggaran 2025 menunjukkan penurunan efektivitas yang sangat tajam di seluruh komponen belanja total Belanja Daerah hanya mencapai realisasi sebesar Rp1.563.674.630.831 dari target Rp2.668.932.529.435, dengan rasio efektivitas 58,59% yang tergolong kurang efektif. Penurunan paling drastis terjadi pada komponen Belanja Modal yang hanya mencapai 31,98%, jauh di bawah ambang batas kategori kurang efektif. Data ini mengindikasikan adanya gangguan serius dalam proses pengadaan aset dan infrastruktur daerah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterlambatan proses lelang, perubahan prioritas kebijakan, atau kendala teknis dalam pelaksanaan proyek fisik. Kondisi ini sejalan dengan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam berbagai laporannya mengidentifikasi bahwa rendahnya penyerapan belanja modal di daerah seringkali dipicu oleh lemahnya perencanaan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran.

Belanja Pegawai pada tahun 2025 mencapai 71,28% dan Belanja Lainnya 58,09%, keduanya masuk kategori kurang efektif. Belanja Barang dan Jasa hanya mencapai 56,38%, juga tergolong kurang efektif. Secara keseluruhan, tahun 2025 menandai kondisi penyerapan anggaran yang paling rendah dalam periode pengamatan. Penurunan drastis ini dapat dikontekstualisasikan dalam kerangka kebijakan fiskal nasional tahun 2025 yang ditandai oleh adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat yang berdampak pada transfer ke daerah, sehingga pemerintah daerah mengalami tekanan likuiditas yang memaksa penyesuaian prioritas belanja di tengah tahun anggaran. Kondisi demikian berimplikasi pada rendahnya penyerapan anggaran lintas komponen belanja secara sistematis. Hal ini memperkuat argumen Luthfi Azhari et al. (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem administrasi pemerintah sangat menentukan kemampuan eksekusi anggaran daerah, terutama dalam kondisi perubahan kebijakan yang bersifat mendadak.

### **Analisis Tren Efektivitas Anggaran 2023-2025**

Apabila dilihat dari dimensi tren antar tahun, pola kinerja anggaran Kabupaten Bangkalan membentuk kurva yang tidak linier. Pada tahun 2023, efektivitas Belanja Daerah berada pada level 87,75% (cukup efektif); kemudian mengalami peningkatan signifikan ke level 98,29% (efektif) pada tahun 2024; dan selanjutnya anjlok ke level 58,59% (kurang efektif) pada tahun 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa kinerja anggaran Kabupaten Bangkalan sangat rentan terhadap faktor-faktor eksternal dan tidak menunjukkan kestabilan yang berkelanjutan. Volatilitas yang tinggi dalam realisasi anggaran ini konsisten dengan temuan Milenia, Sibarani, & Hidayat (2022) yang melakukan analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara dan mendapati bahwa banyak daerah mengalami fluktuasi efektivitas yang signifikan akibat ketidakkonsistenan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Kewenangan daerah dalam menetapkan target yang realistis menjadi kunci utama stabilitas kinerja anggaran.

Komponen yang paling stabil kinerjanya adalah Belanja Pegawai, meskipun juga mengalami pergerakan dari 86,54% (2023) ke 98,00% (2024) dan kemudian turun ke 71,28% (2025). Sementara itu, Belanja Modal merupakan komponen yang paling fluktuatif, dengan capaian tertinggi 105,03% pada 2024 dan capaian terendah 31,98% pada 2025. Fluktuasi ekstrim ini mengindikasikan bahwa perencanaan belanja modal di Kabupaten Bangkalan belum memiliki basis data kapasitas yang memadai, sehingga sulit untuk mempertahankan konsistensi penyerapan dari tahun ke tahun. Yuliyanto et al. (2022) dalam penelitiannya mengenai efisiensi dan efektivitas APBD menyimpulkan bahwa komponen belanja modal cenderung paling rentan terhadap deviasi realisasi karena sifatnya yang sangat bergantung pada proses pengadaan dan kondisi teknis di lapangan.

### **Pembahasan: Implikasi terhadap Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah**

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan periode 2023-2025 berada dalam kategori yang berfluktuasi, dengan rata-rata efektivitas Belanja Daerah sebesar 81,54% yang secara agregat termasuk dalam kategori cukup efektif. Capaian ini

sejalan dengan hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa kinerja anggaran pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat dikategorikan efektif, meskipun dengan catatan bahwa capaian tersebut tidak konsisten di sepanjang periode pengamatan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa aspek kualitas perencanaan anggaran dan sistem pengawasan belum berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pengendalian pelaksanaan program.

Temuan ini memperkuat relevansi Teori Anggaran Berbasis Kinerja yang menekankan bahwa hubungan antara pendanaan dan capaian kinerja harus dibangun secara sistematis melalui perencanaan yang terukur, implementasi yang disiplin, dan evaluasi yang berkesinambungan (Anggraeni & Saleh, 2020). Kelemahan pada salah satu dari tiga fase tersebut sebagaimana tergambar dari penurunan drastis di tahun 2025 dapat menjadi titik lemah yang menggagalkan seluruh siklus anggaran. Dalam perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi atas laporan realisasi anggaran harus dipandang bukan sekadar sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai instrumen manajemen strategis yang mengarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik (Ardiana, Prabawati, & Wijaya, 2024). Hal ini juga diperkuat oleh perspektif akuntansi sektor publik yang dikemukakan dalam konteks nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, di mana akuntabilitas, transparansi, dan kejujuran dalam pelaporan keuangan merupakan fondasi dari kinerja kelembagaan yang berkelanjutan (Oktaviani, Nabilah, & Djasuli, 2023).

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan akurasi penyusunan target anggaran dengan mempertimbangkan kapasitas realisasi historis, memperkuat mekanisme pengawasan berbasis kinerja, serta mengoptimalkan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan program. Fuat & Djasuli (2024) dalam kajian literatur mereka mengenai reformasi anggaran daerah menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tinggi merupakan prasyarat utama untuk mendorong efektivitas penggunaan APBD secara konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, pembenahan pada tataran sistem mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi menjadi agenda prioritas yang tidak dapat ditunda bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam rangka meningkatkan kinerja anggarannya di periode mendatang.

Apabila dikaji dalam kerangka Teori Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting), fluktuasi kinerja anggaran Kabupaten Bangkalan mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip dasar penganggaran berbasis kinerja, khususnya dalam aspek perencanaan yang terukur dan evaluasi yang berkesinambungan (Anggraeni & Saleh, 2020). Tahun 2024 yang mencapai rasio efektivitas 98,29% membuktikan bahwa penerapan prinsip kinerja secara konsisten mampu menghasilkan capaian anggaran yang optimal; sebaliknya, penurunan drastis di tahun 2025 mengonfirmasi bahwa ketika mekanisme perencanaan terdisrupsi oleh faktor eksternal – seperti kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat – seluruh siklus anggaran berbasis kinerja dapat terganggu secara sistemik. Dalam perspektif Teori Value for Money, penurunan efektivitas di tahun 2025 khususnya pada komponen Belanja Modal (31,98%) mengindikasikan bahwa aspek ekonomi dan efisiensi penggunaan sumber daya belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga nilai yang dihasilkan dari setiap rupiah anggaran yang dialokasikan tidak mencapai potensinya. Temuan ini memperkuat urgensi integrasi ketiga dimensi value for money – ekonomi, efisiensi, dan efektivitas – dalam setiap siklus perencanaan dan evaluasi APBD (Polii et al., 2020). Jika dibandingkan dengan studi serupa di daerah lain, pola kinerja anggaran Kabupaten Bangkalan menunjukkan kesamaan sekaligus keunikan tersendiri. Said, Rais, & Timur (2025) dalam penelitian terhadap Kabupaten Gowa menemukan bahwa daerah yang berhasil mengelola pendapatan dengan baik cenderung memiliki realisasi belanja yang stabil, sementara fluktuasi kinerja lebih banyak dipicu oleh pergeseran alokasi antar komponen belanja. Berbeda dengan Bangkalan, Kabupaten Gowa tidak mengalami penurunan drastis dalam satu tahun anggaran, yang mengindikasikan bahwa kapasitas perencanaan internal Bangkalan relatif lebih rentan terhadap guncangan kebijakan eksternal. Milenia, Sibarani, & Hidayat (2022) dalam kajian lintas kabupaten/kota di Sumatera Utara menemukan bahwa daerah-daerah yang mempertahankan konsistensi perencanaan cenderung memiliki rasio efektivitas yang lebih stabil dari tahun ke tahun. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa pola fluktuasi tajam yang terjadi di Kabupaten Bangkalan bukan merupakan keniscayaan, melainkan mencerminkan faktor lokal yang spesifik, terutama ketergantungan yang tinggi pada transfer fiskal pusat dan keterbatasan kapasitas perencanaan pengadaan belanja modal secara mandiri.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan periode 2023-2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran belanja daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, tingkat efektivitas belanja daerah mencapai 87,75% dan tergolong cukup efektif. Mencerminkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal, terutama pada komponen Belanja Lainnya yang hanya mencapai 78,24%. Pada tahun 2024, kinerja anggaran mengalami peningkatan yang berarti dengan rasio efektivitas sebesar 98,29% dan dikategorikan efektif, bahkan komponen Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa melampaui target yang ditetapkan sehingga keduanya tergolong sangat efektif. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan dan koordinasi pelaksanaan anggaran di lingkup pemerintah daerah. Sebaliknya, tahun 2025 mencatat penurunan yang sangat tajam dengan tingkat efektivitas hanya sebesar 58,59% dan dikategorikan kurang efektif. Penurunan ini didorong oleh dua faktor yang saling memperkuat: secara internal, lemahnya basis perencanaan pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan rendahnya penyesuaian prioritas belanja tanpa terkecuali berada di bawah ambang efektivitas yang mengonfirmasi bahwa tekanan finansial tahun 2025 bersifat sistematis dan tidak terbatas pada satu pos belanja saja,

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas belanja daerah Kabupaten Bangkalan selama tiga tahun anggaran adalah 81,54%, yang tergolong dalam kategori cukup efektif. Namun demikian, angka ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena dihitung tanpa pertimbangan bobot anggaran masing-masing tahun. Apabila dihitung berdasarkan total anggaran, nilai efektivitas agregat adalah 80,81% tetap masuk kategori cukup efektif yang mencerminkan gambaran yang lebih representatif atas kinerja keseluruhan. Hasil ini menerima hipotesis penelitian (H1) secara parsial, mengingat capaian kategori efektif hanya terjadi secara konsisten pada tahun 2024. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja anggaran pemerintah daerah belum mencapai kestabilan yang berkelanjutan dan masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, perbaikan mendasar pada aspek akurasi perencanaan, penguatan mekanisme pengawasan berbasis kinerja, serta peningkatan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah menjadi agenda prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan efektif di periode mendatang.

Implikasi yang paling mendesak adalah perlu reformasi pada sistem penetapan target anggaran kabupaten Bangkalan agar berbasis data kapasitas realisasi historis sehingga over-budgeting yang berujung pada rendahnya efektivitas seperti yang terjadi di tahun 2025. Secara khusus, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme mitigasi risiko pada komponen belanja modal yang terbuti fluktuatif (31,98 di 2025 versus 105,03 di 2024)

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan analisis dibatasi hanya pada aspek efektivitas anggaran berdasarkan rasio realisasi terhadap target, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi efisiensi dan ekonomi dalam kerangka value for money secara komprehensif. Kedua, data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan yang dipublikasikan secara resmi, sehingga faktor-faktor kualitatif seperti kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari program-program yang didanai anggaran tersebut tidak dapat diukur dalam penelitian ini. Ketiga, periode pengamatan selama tiga tahun (2023–2025) relatif singkat untuk menarik kesimpulan yang bersifat struktural mengenai pola kinerja anggaran jangka panjang. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) mengeksplorasi pengaruh jenis program tertentu –seperti program infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan– terhadap tingkat efektivitas anggaran, guna mengidentifikasi sektor yang paling berkontribusi terhadap atau menghambat kinerja anggaran secara keseluruhan; (2) mengintegrasikan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, perubahan regulasi fiskal pusat, atau kondisi pandemi terhadap kemampuan penyerapan anggaran pemerintah daerah; (3) melakukan studi komparatif antar kabupaten/kota di Jawa Timur untuk mengetahui apakah pola fluktuasi yang terjadi di Bangkalan bersifat unik atau merupakan fenomena regional yang lebih luas; serta (4) menggunakan metode kualitatif atau mixed methods untuk menggali faktor-faktor non-teknis yang mempengaruhi kinerja anggaran daerah dari perspektif aparatur pengelola keuangan.

## Referensi

- Abbasov, R. (2025). The Effectiveness of Performance-Based Budgeting in the Public Sector : An Empirical Analysis and Policy Implications, *17*(1), 56–76. <https://doi.org/10.4236/ib.2025.171003>
- Anggita Suridiyanti, W., Haliah, H., & Nurleni, N. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Periode Tahun 2019-2021. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, *17*(01), 82–96. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28368>
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung ) The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government. *Indonesian Accounting Research Journal*, *1*(1), 36–44.
- Ardiana, N. N., Prabawati, N. P. A., & Wijaya, K. A. S. (2024). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi). *Socio-Political Communication and Policy Review*, *1*(4), 20–31. <https://doi.org/10.61292/shkr.135>
- Damayanti, A., Khairati, Aini, Q. A., Salsabila, D., & Djasuli, M. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengevaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(24.2), 28–35. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11281>
- Den, & Red. (2025). Program Prioritas Pemkab Bangkalan Tembus Rp135 Miliar, Ini Peruntukannya! Retrieved from <https://www.kanalnews.id/program-prioritas-pemkab-bangkalan-tembus-rp135-miliar-ini-peruntukannya/>
- Fuat, F., & Djasuli, M. (2024). Literatur Review: Reformasi Anggaran Daerah Dan Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis GROWTH*, *22*(1), 125. <https://doi.org/10.36841/growth-journal.v22i1.4333>
- Handayani, S. P., & Zulfatillah, A. (2025). Peningkatan Efektivitas Administrasi Publik melalui Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bapperida Kabupaten Bangkalan. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, *3*(4), 104–114. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v3i4.2121>
- Luthfi Azhari, Tumija, T., & Restu Widyo Sasongko. (2025). Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(2), 116–129. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.271>
- Melkers, J., & Willoughby, K. (2005). Models of Performance-Measurement Use in Local Governments : Understanding Budgeting , Communication , and Lasting Effects.
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, *5*(2), 105–113. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.986>
- Oktaviani, F. A., Nabilah, E., & Djasuli, M. (2023). Pandangan Akuntansi Sektor Publik Dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 23. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, *3*(1), 98–103. <https://doi.org/10.19105/sfj.v3i1.7651>
- Panggalih, F. H., & Bastian, I. (2024). Design of government agency's performance accountability system best practice implementation: Indonesia experience. *Journal of Accounting and Investment*, *25*(2), 498–525. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.20021>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Republik Indonesia*, (2504), 1–9.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY. *Jurnal EMBA*, 8(4), 781–788.

- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Rajib, & Supriyadi. (2025). Tantangan Transformasi dalam Pembangunan Bangkalan 2025-2029. Retrieved from <https://madurapers.com/tantangan-transformasi-dalam-pembangunan-bangkalan-2025-2029/>
- Raniwihati, S., & Djasuli, M. (2024). Implementasi ISAK 35 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Pendidikan. *Jurnal MANEKSI*, 13(3), 741–747.
- Rusdi. (2025). Bupati Bangkalan Siapkan Rp135 Miliar untuk Tiga Program Prioritas 2025. Retrieved from <https://kabarjawatimur.com/2025/06/bupati-bangkalan-siapkan-rp135-miliar-untuk-tiga-program-prioritas-2025/>
- Said, S. N. R., Rais, A. H., & Timur, I. (2025). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 1111–1128. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.637>
- Sofiani, M., & Retnani, E. D. (2019). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya Endang Dwi Retnani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(11), 1–15.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Yonavilbia, E. (2025). Bupati Bangkalan Ajak Semua Pihak Sukseskan Program Prioritas lewat APBD 2025. Retrieved from <https://infopublik.id/kategori/nusantara/926462/bupati-bangkalan-ajak-semua-pihak-sukseskan-program-prioritas-lewat-apbd-2025>
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., Umami, R., Piksi, P., Indonesia, G., & Tengah, J. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>
- Yunas, N. S., Ramadlan, M. F. S., Damayanti, R., & Wahyudi, T. H. (2024). Penguatan Inklusi Sosial Dalam Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Surya Abdimas*, 8(1), 93–105. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3441>